



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANTOSO BUDI WIDIARTO
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 203655

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI , Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 118.466.068

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.040.466.068

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.040.466.068

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIBUT YUDHO AJI WICAKSONO
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 254054

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA MADIUN, Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA Tahun 1991, LAINNYA Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.846.261

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.167.346.261

III. HUTANG Rp. 487.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 679.846.261

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.